



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 46/M.PPN/HK/04/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2019.**
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

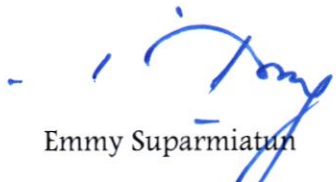
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 46/M.PPN/HK/04/2019
TANGGAL 5 APRIL 2019

DAFTAR RENCANA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2019

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP
DITAWARKAN

1. Bandar Udara Hang Nadim, Batam.

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES
PENYIAPAN

1. Pengembangan Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara;
2. LRT Kota Semarang;
3. Transportasi Perkotaan di Kota Medan;
4. Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bekasi;
5. Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Jawa dan Sumatera;
6. Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau;
7. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
8. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru;
9. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Jawa Barat;
10. Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;
11. Pengembangan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan;
12. Kawasan Industri Teluk Bintuni;
13. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi;
14. Pembangunan Kampus ITB di Cirebon;
15. Pengembangan Rumah Sakit Kanker Dharmais;
16. Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi di Kota Medan;

17. Pengembangan ...

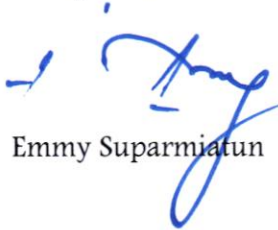
17. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh;
18. Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Industri di Nusakambangan;
19. Pemindahan Lembaga Pemasarakatan dari Pusat Kota ke Pinggiran.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun